PEMERINTAH
KOTA PASURUAN

Rencana Kerja
RENJA

Presented by

Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Pasuruan

(0343) 424 919
disperindagpaskot@gmail.com
www.disperindag.pasuruankota.go.id

2026

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan Pahlawan, Pekuncen, Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur,
KodePos 67126, Telepon (0343) 424919, Faksimile (0343) 424919
Pos-el disperindagpaskot@gmail.com, Laman
disperindag.pasuruankota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PASURUAN
NOMOR 188/ 81 / 423.116/ 2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN
TAHUN 2026

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah No.2 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan No.2 Tahun 2025 Tentang RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
22. Peraturan Walikota Pasuruan No.18 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan;
23. Peraturan Walikota Pasuruan No.26 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas:

1. Merencanakan jadwal dan mempersiapkan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
2. Menghimpun dan menganalisa data dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
3. Melaksanakan Koordinasi dengan bidang – bidang dan UPT di lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan;
4. Mengevaluasi pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan Tugas Kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2026

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Desember 2024

PLT. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PASURUAN

HERY DWI SUJATMIKO, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19701223 199003 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN
NOMOR 188/ 81 /423.116/2024
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN TAHUN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	2	3
1.	PEMBINA	Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.	KOORDINATOR	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.	KETUA I	Kepala Bidang Perdagangan
4.	KETUA II	Kepala Bidang Perindustrian
5.	KETUA III	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar
6.	SEKRETARIS	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan
7.	ANGGOTA	1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		2. Pengawas Perdagangan Ahli Muda
		3. Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda
		4. Kepala UPTD Pasar
		5. Kepala UPT Industri Logam
		6. Kepala UPT Kemetrologian

PLT. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PASURUAN

HERY DWI SUJATMIKO, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19701223 199003 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, maka Rencana Kerja Tahun 2026 dapat disusun. Rencana Kerja tahun 2026 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana pada Rencana Kerja Tahun 2026 ini mengusung tema "Penguatan Transformasi Ekonomi dan Sosial yang Harmoni dan Berkelanjutan".

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2026, disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama tahun 2026, dengan penyempurnaan sesuai Rencana Kerja Walikota dan Wakil Walikota terpilih, serta dengan maksud sebagai referensi dan acuan Dinas dalam melaksanakan Visi Pemerintah Daerah Kota Pasuruan tahun 2025-2029, yaitu :

" PASURUAN KOTA ANUGRAH"

dalam arti :

"Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya, Harmonis Sosial Budayanya, Indah Kotanya "

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) 2026, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya sehingga dapat terselesainya Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja ini kami susun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 28 Agustus 2025

Plt. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PASURUAN

HERY DWI SUJATMIKO, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 198602 1 041

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **5**

DAFTAR ISI **6**

BAB I PENDAHULUAN **7**

1.1 Latar Belakang 7

1.2 Landasan Hukum 8

1.3 Maksud dan Tujuan 12

1.4 Sistematika Penulisan 13

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **14**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 14

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 30

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 35

2.3.1 Isu Perindustrian 36

2.3.2 Isu Perdagangan 36

2.3.3 Isu Pengelolaan Pasar 37

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 38

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 49

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **51**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 51

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 62

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **65**

BAB V PENUTUP **79**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan tahun 2026 merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan perindustrian dan perdagangan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Isi Renja adalah menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada satu tahun ke depan.

Proses penyusunan Renja 2026 OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal tahun rencana strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025-2029. Sedangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi Misi Walikota terpilih pada tahun 2025. Selanjutnya dari rencana strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025-2029 setiap tahun disusun Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja. Renja mempunyai fungsi penting dalam suatu sistem perencanaan daerah, penjelasan mengenai tindak lanjut dengan proses penyusunan

RAPBD, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra).

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPP, RKA OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2021–2041;
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011–2031 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah ke-2 kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026;
28. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2029;

32. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan;
33. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2026;
34. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah:

1. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
3. Mensinergikan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pasuruan dan Rencana Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan 2025-2029.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah:

1. Tersedianya acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran.
2. Terwujudnya pedoman untuk evaluasi program/kegiatan selama satu tahun anggaran.
3. Merumuskan arah kebijakan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2026 disusun berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja PD merupakan Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis PD. Tercapai tidaknya pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Melalui urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan visi misi kepala daerah pada RPJMD 2021-2026. Tahun 2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung misi I yaitu “Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan” dan misi III yaitu “Memantabkan Kehidupan Masyarakat Multikultural yang Harmonis dengan Modal Sosial yang Tangguh serta Jaminan Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Merata”.

Pada tahun 2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki tujuan yakni Kontribusi Sektor Unggulan Meningkat. Pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator tujuan, yaitu Persentase Kontribusi PDRB Sektor Unggulan yang ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 49,50% dan tercapai 49,30%. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki dua sasaran yaitu Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan dan diukur dengan indikator Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan

dengan target 0,15% dan tercapai 0,15%. Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan dan diukur dengan indikator Persentase Peningkatan Omset dengan target 1,25% dan tercapai 25,19%.

Pencapaian target ini juga didukung oleh program dan kegiatan pada urusan perdagangan dan urusan perindustrian. Pada penyelenggaraan urusan perdagangan didukung oleh 6 (enam) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan. Program pertama adalah Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen terhadap Perlindungan Konsumen. Pada tahun 2024, ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 90% sehingga capaiannya sebesar 113%. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh hasil pre test dan post tes serta hasil pengawasan yang ditemukan.

Program kedua yaitu Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Ketercapaian Retribusi Pasar. Pada tahun 2024, ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 77,53% sehingga capaiannya sebesar 77,53%. Kurangnya ketercapaian retribusi pelayanan pasar dari target indikator yang ditetapkan disebabkan masih adanya adaptasi dan penyesuaian pedagang terhadap tarif retribusi pelayanan pasar pada tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar belum maksimal. Hal tersebut dipengaruhi juga dengan adanya para pedagang mebel Pasar Bukir tidak ada kontribusi pembayaran terkait jasa retribusi pelayanan pasar dikarenakan pangsa pasar mebel saat ini lesu dan sepi pengunjung. Selanjutnya rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan memaksimalkan potensi objek retribusi yang ada di pasar dan dilakukan pematangan kajian sewa lahan parkir.

Program ketiga yaitu Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diukur dengan satu

indikator yaitu Rata-rata Persentase Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok. Pada tahun 2024, ditargetkan sebesar 10% dan terealisasi 16,32% sehingga capaiannya sebesar 36,80%. Capaian ini berdasarkan data hasil monitoring kebutuhan pokok selama tahun 2024. Ketidaktercapaian target indikator disebabkan oleh faktor yang tidak menentu, seperti kondisi cuaca, panen raya, hama, serta *supply and demand* yang menyebabkan harga bahan pokok dapat berubah sewaktu - waktu. Kami sebagai dinas yang membidangi perdagangan selalu bertugas memantau harga dan stok barang kebutuhan pokok hanya dapat berusaha menekan harga bahan pokok dengan langkah-langkah tertentu yang sudah ditetapkan seperti pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah.

Program keempat yaitu Program Pengembangan Ekspor diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Peningkatan IKM yang Melakukan Ekspor. Pada tahun 2024, ditargetkan sebesar 5% dan terealisasi 17,39% sehingga capaiannya sebesar 348%. Capaian ini berdasarkan jumlah pelaku usaha ekspor pada tahun 2024 sebanyak 27 orang sedangkan pelaku usaha ekspor pada tahun 2023 sebanyak 23 orang. Ketercapaian target indikator didukung oleh follow-up dari para pelaku usaha ekspor terhadap para customers sehingga setelah melaksanakan kegiatan promosi dagang membuahkan hasil yang sangat signifikan.

Program kelima yaitu Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen diukur dengan satu indikator yaitu persentase UTTP yang telah ditera/tera ulang. Pada tahun 2024, ditargetkan sebesar 11% dan terealisasi 17,54% sehingga capaiannya sebesar 159%. Capaian ini berdasarkan data UTTP yang telah ditera/tera ulang pada tahun 2024 sebanyak 2258 dibandingkan potensi alat UTTP secara keseluruhan sejumlah 12870. Ketercapaian target indikator didukung oleh SDM UPT. Kemetrologian Kota Pasuruan sudah memadai sehingga pelayanan tera/tera ulang lebih efektif dan efisien, tidak ada penarikan retribusi (gratis) pelayanan tera/tera ulang tahun 2024, dan dampak sosialisasi perundang-undangan tahun 2023 di 30

kelurahan se-Kota Pasuruan untuk mengajukan sidang tera/tera ulang di kelurahan.

Pada penyelenggaraan urusan perindustrian didukung oleh 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Peningkatan IKM berkembang. Pada tahun 2024, ditargetkan sebesar 5% dan terealisasi 5,95% sehingga capaiannya sebesar 119%. Capaian ini berdasarkan jumlah IKM yang berkembang pada tahun 2024 mencapai 89 IKM, dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 84 IKM. Ketercapaian target indikator pada tahun ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan pelatihan, fasilitasi dan sertifikasi produk berkelanjutan yang didukung dari anggaran bersumber dari DAK Non-Fisik Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) PD merupakan Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis PD. Tercapai tidaknya pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Adapun faktor yang mempengaruhi pencapaian target antara lain adalah kecukupan anggaran, sedangkan *schedule* harus sesuai dengan SIPD, serta faktor jangka waktu dalam pengadaan barang/jasa, dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan, adanya beberapa faktor tersebut menyebabkan kurang maksimalnya target yang telah direncanakan.

Untuk mencapai target tahun yang akan datang dan program/kegiatan bisa terlaksana dengan baik, maka perlu adanya dukungan perencanaan, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana yang memadai serta anggaran yang cukup agar program/kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2026 dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini dapat dilihat pada Tabel T-C.29.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
3	**30**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**98**	**95,5**	**98**	**100**	**102%**	**98**	**98**	**100%**
3	**30**	**01**	**2**	**01**		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu***	**98**	**100**	**98**	**100**	**102%**	***98***	**99**	**101%**
3	30	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	16	4	4	4	100%	4	12	75%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
3	30	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16	4	4	4	100%	4	12	75%
3	30	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	1	1	1	100%	0	2	50%
3	**30**	**01**	**2**	**02**		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu***	**98**	**100**	**98**	**100**	**102%**	***98***	**99**	**101%**
3	30	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	65	65	65	65	100%	68	66	102%
3	30	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16	4	4	4	100%	4	12	75%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
3	**30**	**01**	**2**	**03**		***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu***	**98**	**100**	**98**	**100**	**102%**	***98***	**99**	**101%**
3	30	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	16	4	4	4	100%	4	12	75%
3	**30**	**01**	**2**	**06**		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran***	**98**	**100**	**98**	**100**	**102%**	***98***	**99**	**101%**
3	30	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	44	15	11	7	64%	40	62	141%
3	30	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	180	12	45	12	27%	0	24	13%
3	30	01	2	06	07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	0	0	0	0%	1	1	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
3	30	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	48	6	12	12	100%	12	30	63%
3	30	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	11	12	12	100%	12	35	73%
3	**30**	**01**	**2**	**07**		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah***	**90**	**100**	**0**	**0**	**0%**	**-**	100	111%
3	30	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	44	8	0	0	0%	**-**	8	18%
3	**30**	**01**	**2**	**08**		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	**98**	**100**	**98**	**100**	**102%**	***98***	**99**	**101%**
3	30	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	80	5	20	12	60%	0	17	21%
3	30	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	12	12	12	100%	12	36	75%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
3	30	01	2	08	04	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	12	12	12	100%	12	36	75%
3	**30**	**01**	**2**	**09**		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase barang milik daerah yang terpelihara***	**98**	**100**	**98**	**100**	**102%**	***98***	**99**	**101%**
3	30	01	2	09	01	Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	56	14	14	11	79%	9	34	61%
3	30	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	92	17	23	15	65%	13	45	49%
3	30	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16	10	4	4	100%	27	41	256%
3	30	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4	1	1	1	100%	1	3	75%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
3	**30**	**02**				**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen**	**80**	**77,5**	**80**	**90**	**113%**	**80**	**83**	**103%**
3	**30**	**02**	**2**	**06**		***Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah pedagang/produsen yang memenuhi asas perlindungan konsumen***	**600**	**85**	**120**	**133**	**111%**	***16***	**78**	**13%**
3	30	02	2	06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah laporan hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	8	1	3	3	100%	2	6	75%
3	**30**	**03**				**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase ketercapaian retribusi pasar**	**100**	**72,95**	**100**	**77,53**	**78%**	**100**	**83,49**	**83%**
3	**30**	**03**	**2**	**01**		***Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan***	***Persentase pasar yang direvitalisasi***	***33,33***	**25**	**33,33**	**33,33**	**100%**	***33,33***	**30,55**	**92%**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
3	30	03	2	01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	12	3	3	2	67%	3	8	67%
3	30	03	2	01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	24	6	6	6	100%	6	18	75%
3	**30**	**03**	**2**	**02**		***Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya***	***Persentase pelaku perdagangan yang dibina***	***6,4***	**17,45**	**12,4**	**12,4**	**100%**	***13,77***	**15**	**227%**
3	30	03	2	02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	12	2	1	1	100%	3	6	50%
3	30	03	2	02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	48	12	12	12	100%	12	36	75%
3	**30**	**04**				**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Rata-rata persentase fluktuasi harga bahan pangan pokok**	**10**	**8,63**	**10**	**16,32**	**37%**	**10**	**11,65**	**84%**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
3	**30**	**04**	**2**	**02**		***Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota***	***Persentase harga pangan yang mengalami fluktuasi harga lebih besar 10%***	**10**	**8,19**	**10**	**16,5**	**35%**	***10***	**11,56**	**84%**
3	30	04	2	02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	48	12	12	12	100%	12	36	75%
3	30	04	2	02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4	2	1	1	100%	0	3	75%
3	**30**	**05**				**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase peningkatan IKM yang melakukan ekspor**	**5**	**7,27**	**5**	**17,39**	**348%**	**0**	**8,22**	**164%**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
3	**30**	**05**	**2**	**01**		***Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase IKM yang melakukan ekspor***	**0,4**	**0,64**	**0,4**	**0,79**	**198%**	***0***	**0,48**	**119%**
3	30	05	2	01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina	800	200	0	0	0%	0	200	25%
3	30	05	2	01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	140	29	35	68	194%	0	97	69%
3	30	05	2	01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	12	0	3	3	100%	0	3	25%
3	**30**	**06**				**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Prosentase alat UTTP yang telah ditera/tera ulang**	**11**	**12,09**	**11**	**17,54**	**159%**	**11**	**13,54**	**123%**
3	**30**	**06**	**2**	**01**		***Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan***	***Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan tera, tera ulang***	**4**	**1**	**1**	**1**	**100%**	***1***	**3**	**75%**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
3	30	06	2	01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	4000	2080	1000	2258	226%	1000	5338	133%
3	30	06	2	01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina	160	1720	40	40	100%	40	1800	1125%
3	**30**	**07**				**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Presentase IKM yang Mengalami Peningkatan Pemasaran**	**30**	**57,25**	**0**	**0**	**-**	**-**	**19**	**64%**
3	30	07	2	01		***Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri***	***Persentase IKM yang dipromosikan***	**4**	4,77	0	**0**	**-**	**-**	**2**	**40%**
3	30	07	2	01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	600	163	0	0	-	-	163	27%
3	**31**					**URUSAN PERINDUSTRIAN**									
3	**31**	**2**				**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Peningkatan IKM Berkembang**	**5**	**219,15**	**5**	**5,95**	**119%**	**5**	**77**	**1534%**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
3	**31**	**2**	**2**	**01**		***Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota***	***Persentase IKM berkembang***	***30***	**38,1**	**30**	**64,96**	**217%**	***30***	**44**	**148%**
3	31	2	2	01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	24	6	6	6	100%	6	18	75%
3	31	2	2	01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	36	0	9	9	100%	4	13	36%
3	31	2	2	01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2	0	0	0	0%	2	2	100%
3	31	2	2	01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	20	5	9	12	133%	1	18	90%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program/kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan digunakan beberapa indikator, yakni mengacu pada sasaran target sesuai dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan yang disajikan Tabel T-C.30.

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Pasuruan

No	Indikator	Angka/ Nilai target/ standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	Tujuan	49,00%	49,05%	49,10%	-	49,63%	49,79%	49,30%	-	
2	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Tujuan	-	-	-	1350	-	-	-	1350	dalam Milyar Rupiah
3	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Tujuan	-	-	-	2100	-	-	-	2100	dalam Milyar Rupiah
4	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	Sasaran	-	-	-	0,15%	-	-	-	0,15%	
5	Persentase Peningkatan Nilai Omset Penjualan	Sasaran	-	-	-	0,01%	-	-	-	0,01%	
6	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	Sasaran	0,1%	0,1%	0,15%	-	0,09%	0,24%	0,15%	-	
7	Persentase Peningkatan Omset	Sasaran	1%	1%	1,25%	-	4166%	9,92%	25,19%	-	

No	Indikator	Angka/ Nilai target/ standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	IKK	-	-	-	-	0,57	0,16	19,20	-	
9	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	IKK	-	-	-	-	50,00	-	47,25	-	
10	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	IKK	-	-	-	-	0,71	30,77	33,33	-	
11	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	IKK	-	-	-	-	-	-	100%	-	

No	Indikator	Angka/ Nilai target/ standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/ kota	IKK	-	-	-	-	100%	-	-	-	
13	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	IKK	-	-	-	-	40	40	125	-	
14	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	IKK	-	-	-	-	100	100	100	-	
15	Persentase kinerja realisasi pupuk	IKK	-	-	-	-	100	100	67,60	-	
16	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	IKK	11%	11%	11%	11%	15,24%	20,29%	17,54%	11%	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dalam pembangunan ekonomi Kota Pasuruan adalah meningkatkan kontribusi PDRB Sektor Unggulan yang terdiri dari kontribusi PDRB kategori perindustrian dan kategori perdagangan. Dua kategori tersebut merupakan kategori yang mendominasi pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan. Pada tahun 2024, kedua kategori tersebut berkontribusi sebesar 49,30%. Artinya bahwa kategori perindustrian dan perdagangan berperan sebagai motor penggerak utama perekonomian di Kota Pasuruan.

Pada tabel T-C.30 dapat dijelaskan bahwa pada indikator sasaran yang capaiannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan

Pada tahun 2024, target indikator untuk Sasaran Pertama sebesar 0,15% dan realisasi sebesar 0,15% sehingga ketercapaian target sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan updating data nilai produksi sektor unggulan. Ketercapaian target indikator didukung oleh peningkatan nilai produksi, kualitas SDM dan produk melalui kegiatan pelatihan/pendampingan dan fasilitasi sertifikasi kompetensi dan sertifikasi produk dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2024. Secara umum kinerja penyelenggaraan urusan perindustrian beserta program, kegiatan dan sub kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Persentase peningkatan produksi sektor unggulan mencapai 0,15% sesuai target yang ditetapkan sebesar 0,15%. Persentase peningkatan produksi sektor unggulan ini didasarkan pada berkembangnya jumlah IKM di Kota Pasuruan melalui peningkatan skill atau kemampuan SDM, peningkatan kualitas mutu produk, sertifikasi kompetensi dan diversifikasi produk yang dihasilkan setelah mengikuti kegiatan perindustrian berupa pelatihan pengembangan SDM, pendampingan dan sertifikasi produk.

2. Persentase Peningkatan Omset

Pada tahun 2024, target indikator untuk Sasaran Kedua sebesar 1,25% dan realisasi sebesar 25,9% sehingga

ketercapaian target sebesar 2072%. Capaian ini berdasarkan data updating data penjualan produk sektor unggulan yang telah dilaksanakan Ketercapaian target indikator didukung oleh kegiatan promosi produk unggulan yang dilaksanakan beberapa kali baik di dalam kota dan di luar kota, selain itu semangat pelaku usaha sektor unggulan dalam memasarkan produk juga menjadi faktor bertambahnya peningkatan omset dari tahun 2023 ke 2024. Peningkatan omset dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kualitas produk unggulan, peningkatan skill atau kemampuan SDM dalam memasarkan produknya, dan banyaknya memanfaatkan peluang dalam proses pemasaran. Melalui program/kegiatan tahun 2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan telah memfasilitasi para pelaku usaha, khususnya UKM dan UMKM untuk mampu mengikuti berbagai pameran/*event* yang ada. Sehingga keikutsertaan para pelaku usaha inilah yang banyak mempengaruhi peningkatan pemasaran para pelaku usaha.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis pada hakikatnya merupakan masalah yang harus diprioritaskan untuk ditangani oleh pemerintah Kota Pasuruan sesuai dengan urgensi, relevansi penanganan, kedudukan dan kemampuan daerah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program-program pembangunan. Dari analisis lingkungan internal maupun eksternal dapat dirumuskan isu strategis yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan lima tahun dalam kaitannya dengan fokus misi dan agenda, antara lain:

1) Penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDRB
2) Harga bahan pokok yang fluktuatif
3) Lemahnya sarana prasarana perdagangan

Penjelasan isu-isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.1 Isu Perindustrian

1) Kurangnya sarana prasarana untuk kebutuhan industri logam, seperti mesin dan sarana promosi produk logam;
2) Ketersediaan tenaga terampil yang masih kurang untuk industri kecil menengah (IKM) komoditi kerajinan batik (regenerasi yang minim);
3) Keterbatasan anggaran/biaya untuk kepengurusan legalitas bahan baku kayu bagi IKM mebel berupa pelayanan dan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK);
4) Pengembangan usaha yang terkendala modal bagi IKM makanan dan minuman;
5) Industri kreatif yang terkendala pengembangan produk berupa media promosi yang masih kurang; dan
6) Masih banyak IKM yang belum memahami tata cara pengurusan dan pelaporan SIINas.

2.3.2 Isu Perdagangan

1) Belum maksimalnya hasil produk dari UMKM untuk dipasarkan baik melalui pameran atau melalui penjualan dengan sistem kemitraan, sehingga diperlukan terobosan/inovasi dalam hal memasarkan produk UMKM dengan memanfaatkan teknologi informasi;
2) Pengembangan/Revitalisasi kawasan perdagangan dan jasa (pengembangan pasar);
3) Belum adanya regulasi tentang perusahaan berkategori ekspor-impor untuk melaporkan datanya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
4) Masih banyaknya pengusaha UKM yang belum memanfaatkan potensi pemasaran antar daerah/antar pulau melalui fasilitas pasar lelang komoditi, hal ini sangat berpengaruh pada sistem promosi dan distribusi lokal Kota Pasuruan;
5) Harga kebutuhan bahan pangan pokok yang bersifat fluktuatif menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Nataru;

6) Kurangnya minat masyarakat dalam pemakaian produk dalam negeri;
7) Kurang adanya kesadaran dari para pedagang pasar atau diluar lingkungan pasar terhadap peneraan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan perlengkapannya, sehingga untuk menciptakan pasar tertib ukur masih jauh dari harapan dan banyak konsumen yang dirugikan; dan
8) Kurangnya keinginan untuk memanfaatkan fasilitas pendaftaran online pelayanan tera-tera ulang oleh pemilik alat-alat UTTP terutama di tingkat perusahaan.

2.3.3 Isu Pengelolaan Pasar

1) Masih banyak sarana prasarana pasar yang kurang layak sehingga perlu adanya perbaikan dan pemeliharaan;
2) Manajemen pengelolaan pasar yang masih belum optimal dan perlu dibenahi;
3) Belum adanya digitalisasi dalam pelaksanaan pengelolaan pasar;
4) Pelaksanaan dan penerapan e-retribusi yang masih terkendala dengan kualitas SDM pedagang pasar; dan
5) Adanya kesenjangan keberadaan pasar sehingga diperlukan pembangunan pasar baru di Kecamatan Bugul Kidul.

Dari uraian isu di atas, tentunya akan mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Walikota. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung misi ke-3 Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan. Program Prioritas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung misi ke-3 adalah Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dipengaruhi oleh manajamen pengelolaan pasar. Untuk mencapai keberhasilan misi ke-3 maka perlu dilakukan revitalisasi pada pasar dan

melakukan pengawasan pengelolaan pasar secara rutin. Selain itu melaksanakan pembangunan rintisan pasar baru di Kecamatan Bugul Kidul yang merupakan program prioritas Walikota Tahun 2025-2029.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pada rancangan awal RKPD tahun 2026 yang kemudian dianalisis sesuai hasil analisa kebutuhan, pagu anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan tidak mengalami perubahan, dengan total pagu sebesar Rp.29.493.756.909,-

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan kami sajikan pada Tabel T-C.31.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**Urusan Pemerintahan Pilihan**				**29.493.756.909**	**Urusan Pemerintahan Pilihan**				**29.493.756.909**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Kota Pasuruan**	**Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**3 level 75 Nilai**	**8.878.776.709**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Kota Pasuruan**	**Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**3 level 75 Nilai**	**8.878.776.709**	
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kota Pasuruan**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai ketentuan**	**11 Dokumen**	**15.008.200**	**Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Pasuruan**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai ketentuan**	**11 Dokumen**	**15.008.200**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	10.974.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	10.974.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	4.034.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	4.034.000	
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kota Pasuruan**	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**100%**	**7.725.703.059**	**Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Pasuruan**	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**100%**	**7.725.703.059**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	67 Orang/bulan	7.669.258.959	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	67 Orang/bulan	7.669.258.959	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16 Laporan	56.444.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16 Laporan	56.444.100	
	Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kota Pasuruan**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**4 Laporan**	**8.634.800**	**Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kota Pasuruan**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**4 Laporan**	**8.634.800**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	4 Laporan	8.634.800	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	4 Laporan	8.634.800	
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kota Pasuruan**	**Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa**	**4 Laporan**	**129.332.400**	**Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Pasuruan**	**Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa**	**4 Laporan**	**129.332.400**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Paket	3.434.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Paket	3.434.400	
	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	110.898.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	110.898.000	
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kota Pasuruan**	**Jumlah barang milik daerah yang disediakan**	**7 Unit**	**29.699.750**	**Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Pasuruan**	**Jumlah barang milik daerah yang disediakan**	**7 Unit**	**29.699.750**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 Unit	29.699.750	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 Unit	29.699.750	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Pasuruan**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4 Laporan**	**772.198.500**	**Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pasuruan**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4 Laporan**	**772.198.500**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	1.970.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	1.970.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	123.328.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	123.328.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	646.900.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	646.900.500	
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Pasuruan**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**37 Unit**	**198.200.000**	**Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pasuruan**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**37 Unit**	**198.200.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11 Unit	145.450.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11 Unit	145.450.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 Unit	7.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 Unit	7.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Unit	17.750.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Unit	17.750.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	28.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	28.000.000	
2	**Urusan Perdagangan**				**19.682.114.700**	**Urusan Perdagangan**				**19.682.114.700**	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang layak**	**10%**	**17.953.281.500**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang layak**	**10%**	**17.953.281.500**	
	Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase pasar yang direvitalisasi**	**50%**	**13.897.745.200**	**Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase pasar yang direvitalisasi**	**50%**	**13.897.745.200**	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	3 Unit	12.597.745.200	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	3 Unit	12.597.745.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	6 Unit	1.300.000.000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	6 Unit	1.300.000.000	
	Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina**	**100%**	**4.055.536.300**	**Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina**	**100%**	**4.055.536.300**	
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	4 Dokumen	4.055.536.300	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	4 Dokumen	4.055.536.300	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen**	**70%**	**53.217.000**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen**	**70%**	**53.217.000**	
	Kegiatan : Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Kabupaten/Kota	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Jumlah pedagang/produsen yang memenuhi asas perlindungan konsumen**	**14 Pedagang/ Produsen**	**53.217.000**	**Kegiatan : Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Kabupaten/Kota**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Jumlah pedagang/produsen yang memenuhi asas perlindungan konsumen**	**14 Pedagang/ Produsen**	**53.217.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan : Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen (P-B2)	Kota Pasuruan	Jumlah laporan hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	2 Laporan	53.217.000	Sub Kegiatan : Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen (P-B2)	Kota Pasuruan	Jumlah laporan hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	2 Laporan	53.217.000	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Indeks Perkembangan Harga**	**2 Indeks**	**595.912.300**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Indeks Perkembangan Harga**	**2 Indeks**	**595.912.300**	
	Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Jumlah Bahan Pokok dan Barang Penting yang dipantau**	**69 Bapokting**	**595.912.300**	**Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Jumlah Bahan Pokok dan Barang Penting yang dipantau**	**69 Bapokting**	**595.912.300**	
	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	94.697.900	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	94.697.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	501.214.400	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	501.214.400	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Presentase Kepatuhan Pedagang/pelaku usaha terhadap tertib niaga**	**65%**	**110.164.400**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Presentase Kepatuhan Pedagang/pelaku usaha terhadap tertib niaga**	**65%**	**110.164.400**	
	Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Presentase Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang telah di Tera dan Tera Ulang**	**16%**	**110.164.400**	**Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**Presentase Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang telah di Tera dan Tera Ulang**	**16%**	**110.164.400**	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Pasuruan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2100 Unit	97.787.800	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Pasuruan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2100 Unit	97.787.800	
	Sub Kegiatan : Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Pasuruan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	40 orang	12.376.600	Sub Kegiatan : Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Pasuruan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	40 orang	12.376.600	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Kota Pasuruan**	**Presentase IKM yang Mengalami Peningkatan Pemasaran**	**30%**	**969.539.500**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Kota Pasuruan**	**Presentase IKM yang Mengalami Peningkatan Pemasaran**	**30%**	**969.539.500**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan: Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Kota Pasuruan**	**Persentase IKM yang dipromosikan**	**20%**	**969.539.500**	**Kegiatan: Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Kota Pasuruan**	**Persentase IKM yang dipromosikan**	**20%**	**969.539.500**	
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20 UMKM	969.539.500	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20 UMKM	969.539.500	
3	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**				**932.865.500**	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**				**932.865.500**	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Dalam dan Luar Kota**	**Persentase peningkatan IKM berkembang**	**5%**	**932.865.500**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Dalam dan Luar Kota**	**Persentase peningkatan IKM berkembang**	**5%**	**932.865.500**	
	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Dalam dan Luar Kota**	**Persentase IKM berkembang**	**20%**	**932.865.500**	**Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Dalam dan Luar Kota**	**Persentase IKM berkembang**	**20%**	**932.865.500**	
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	5 Dokumen	192.865.500	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dalam dan Luar Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	5 Dokumen	192.865.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	150.000.000	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	150.000.000	
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen	175.000.000	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen	175.000.000	
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	350.000.000	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	350.000.000	
	Sub Kegiatan: Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2 Dokumen	65.000.000	Sub Kegiatan: Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2 Dokumen	65.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dilakukan pula forum perangkat daerah yang mengundang masyarakat untuk ikut serta dalam penyusunan rencana kerja. Usulan ini dihasilkan dari aspirasi masyarakat melalui proses musrenbang kelurahan dilanjutkan musrenbang kecamatan dan terakhir musrenbang kota. Dengan adanya musrenbang diharapkan dapat menampung aspirasi masyarakat serta menjawab isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya hasil musrenbang kota akan dievaluasi dan disesuaikan dengan program/kegiatan PD yang bersangkutan.

Pada Rencana Kerja Tahun 2026, terdapat usulan dari masyarakat dalam bentuk sertifikasi halal. Setelah dilakukan analisis dan sinkronisasi dengan program/kegiatan yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan, usulan kegiatan dari masyarakat berupa sertifikasi halal tersebut dapat diakomodir melalui sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dalam Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dari Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Berikut usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan yang disajikan pada Tabel T-C.32.

Tabel T-C.32
Usulan program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Usulan	Asal Usulan (Musrenbang/ Pokir/ Forum PD)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
BIDANG INDUSTRI							
1	Sertifikasi dan Pendampingan	Musrenbang	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kota Pasuruan	Persentase peningkatan IKM berkembang	5%	
			Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase IKM yang berkembang	20%	
			Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	
			1. Sertifikasi Halal	Kota Pasuruan	Jumlah IKM yang difasilitasi	5 IKM	Diakomodir

Sumber : Hasil Musrengbangkel (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan nasional diawali dengan penciptaan kondisi dasar yang menjadi pondasi dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang RPJPN, Visi Pembangunan Nasional Jangka Panjang adalah Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Kerangka Visi Indonesia Emas 2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 adalah: Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045, yang telah dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional Asta Cita, yakni sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan; dan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Adapun 17 program prioritas tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air;
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara;
3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi;
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Pemberantasan Kemiskinan;
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
7. Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat;
8. Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi;

9. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif;
10. Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas;
11. Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup;
12. Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani;
13. Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Pedesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan;
14. Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya;
15. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), Termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi;
16. Memastikan Kerukunan Antar umat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah; dan
17. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga.

Dari 8 Prioritas Nasional Asta Cita di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan selaras dengan prioritas nasional ke 3 yaitu Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.

Telaah kebijakan dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, sehingga diharapkan program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi. Berikut diuraikan telaah kebijakan nasional maupun kebijakan provinsi, antara lain:

1. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah RKP 2026 adalah RKP tahun kedua dalam konteks rencana pembangunan lima tahunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. RKP 2026 bertema "Kedaulatan Pangan dan Energi" serta "Ekonomi yang Produktif dan Inklusif" dijabarkan dalam 2 Prioritas Pembangunan.

1) Kedaulatan Pangan dan Energi
   - Peningkatan produksi pangan dan energi dalam negeri, termasuk optimalisasi Bulog, lumbung pangan, peningkatan bauran ethanol dan biodiesel, energi terbarukan, serta pengelolaan sampah;
   - Penyediaan air bersih dan pengelolaan air secara terintegrasi;
   - Penyediaan air bersih dan pengelolaan air secara terintegrasi.
2) Ekonomi yang Produktif dan Inklusif
   - Pendidikan dan kesehatan: Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta perbaikan layanan kesehatan.
   - Deregulasi dan kepastian hukum: Pemangkasan regulasi yang menghambat investasi dan mendorong kepastian hukum.
   - Percepatan pertumbuhan ekonomi: Dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi, inovasi, dan adopsi teknologi.
   - Pengentasan kemiskinan: Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang terarah.
   - Stabilitas makroekonomi: Pemeliharaan stabilitas ekonomi makro melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat.

2. Kementerian Perdagangan

Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan, yaitu 2025-2029, akan mengikuti visi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) 2025-2045. RPJPN, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, menjadi landasan utama bagi pembangunan nasional selama 20 tahun berikutnya. Pembangunan Perdagangan ini akan mendukung Visi Indonesia Emas 2045, yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Kementerian Perdagangan memiliki peran penting dalam pembangunan sektor ekonomi, khususnya melalui pengembangan perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Kementerian ini bertanggung jawab atas kebijakan perdagangan, termasuk penataan pasar, promosi produk lokal, dan pengaturan impor-ekspor, yang berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

1. Perdagangan Dalam Negeri
    - Pengembangan UMKM: Kementerian Perdagangan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai program, seperti fasilitasi akses pasar, peningkatan kualitas produk, dan pengembangan e-commerce.
    - Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Produk: Kementerian memastikan ketersediaan dan kualitas produk dalam negeri, termasuk barang kebutuhan pokok, melalui pengawasan pasar dan penanganan masalah distribusi.
    - Pemasaran Produk Dalam Negeri: Kementerian juga fokus pada promosi dan pemasaran produk dalam negeri, baik melalui pasar tradisional maupun ritel modern, untuk meningkatkan daya saing produk lokal.
2. Perdagangan Luar Negeri
    - Promosi Ekspor: Kementerian berperan dalam mempromosikan produk Indonesia di pasar internasional, melalui berbagai kegiatan promosi, pameran, dan perundingan perdagangan.

- Diversifikasi Produk Ekspor: Kementerian mendorong diversifikasi produk ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada satu komoditas utama dan meningkatkan nilai tambah produk.
- Peningkatan Kapasitas Industri Lokal: Kementerian juga fokus pada peningkatan kapasitas industri lokal, termasuk pengembangan infrastruktur dan teknologi, untuk mendukung pertumbuhan ekspor.

3. Pengaturan dan Kebijakan Perdagangan
   - Pengaturan Impor dan Ekspor: Kementerian menetapkan kebijakan dan peraturan terkait impor dan ekspor, termasuk tarif, kuota, dan standar produk, untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan melindungi kepentingan konsumen.
   - Penanganan Kasus Perlindungan Konsumen: Kementerian juga menangani kasus pelanggaran perlindungan konsumen dan memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi di pasar.
   - Peningkatan Tata Kelola Perdagangan: Kementerian terus berupaya meningkatkan tata kelola perdagangan, termasuk reformasi birokrasi dan digitalisasi, untuk menciptakan lingkungan yang lebih efisien dan transparan.

3. Kementerian Perindustrian

Visi pembangunan industri nasional dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh. Industri tangguh bercirikan Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan; Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan Industri yang berbasis inovasi dan teknologi. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 7 (tujuh) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1) Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional.

2) Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional.
3) Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau.
4) Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.
5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.
6) Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional dan
7) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Timur 2026

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026, tema pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur ini selaras dengan arah pembangunan RPD tahun 2025-2026. RPD tersebut merupakan dokumen perencanaan transisi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur pada Tahun 2025-2026 yang harus disusun dikarenakan RPJMD Provinsi Jawa Timur berakhir pada Tahun 2024.

Adapun Tema Pembangunan Jawa Timur pada 2026 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi. Tema ini menekankan pada pembangunan yang inklusif, fokus pada wilayah strategis, dan peningkatan produktivitas untuk mencapai kemandirian pangan dan energi. Terdapat sembilan prioritas pembangunan provinsi Jawa Timur tahun 2026, antara lain:

1) Jatim Sejahtera

   Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan.

2) Jatim Kerja

   Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas.

3) Jatim Akses

   Memperkuat Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah dan Intra Aglomerasi yang Berkualitas, Modern, Terpadu, dan Berkeadilan.

4) Jatim Agro

   Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan.

5) Jatim Cerdas

   Memperkuat Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas, Merata, dan Berkeadilan.

6) Jatim Sehat

   Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan.

7) Jatim Berkah Amanah

   Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif.

8) Jatim Harmoni

   Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.

9) Jatim Lestari

   Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam prioritas pembangunan Jawa Timur 2026, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan mendukung prioritas ketiga Jatim Kerja yaitu memperluas lapangan kerja yang berkualitas dengan menumbuhkan perekonomian sektor unggulan.

5. Prioritas Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2026

Mengacu pada RPJMD 2025-2029, Kota Pasuruan mengusung tema “Penguatan Transformasi Ekonomi dan Sosial yang Harmoni dan Berkelanjutan.” Dari tema tersebut, dilakukan upaya untuk memberikan fokus terhadap capaian tematik pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2026, yang

diturunkan menjadi 8 (delapan) prioritas pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2026, antara lain:

1) Pembangunan SDM yang berkarakter;
2) Peningkatan kualitas infrastruktur penunjang perekonomian;
3) Stimulus daya tarik investasi;
4) Menumbuhkan perekonomian sektor unggulan;
5) Efektifitas birokrasi dan pelayanan publik;
6) Meningkatkan harmonisasi sosial;
7) Pengurangan kemiskinan; dan
8) Sarpras pendidikan dan kesehatan berkualitas.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung beberapa prioritas pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2026, prioritas 2 dan 4 yaitu peningkatan kualitas infrastruktur penunjang perekonomian dan menumbuhkan perekonomian sektor unggulan.

Dari serangkaian kebijakan tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Timur Tahun 2026, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2026, dilakukan upaya untuk memastikan keselarasan kebijakan atau linieritas arah pembangunan Kota Pasuruan telah mendukung arah pembangunan RKP Nasional.

Program Prioritas Kota Pasuruan Tahun 2025-2029:

1. Pemberian makanan kepada yang terkena stunting;
2. Optimalisasi peran pelabuhan bekerja sama dengan provinsi;
3. Pembangunan rintisan pasar baru di Kecamatan Bugul Kidul;
4. Pendirian Islamic Center ex lapas;
5. Pendirian BUMD Pasar;
6. Pendirian Pasuruan Creative Center;
7. Target penurunan stunting di bawah angka 5%;
8. Pemberdayaan organisasi keagamaan/komunitas santri terhadap pengembangan ekonomi (santripreneur);
9. Pengurangan kantong-kantong kemiskinan;

10. Kenaikan insentif bagi RT dan RW di Kota Pasuruan;
11. Optimalisasi Sekolah lanjut usia tangguh (Selantang) Mandiri;
12. Perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi anak rentan, disabilitas, lansia terlantar, masyarakat berpendapatan rendah, korban bencana dan lainnya;
13. Optimalisasi anggaran untuk mendukung program MBG di Kota Pasuruan;
14. Pembuatan Co-Working Space di setiap kelurahan;
15. Perbaikan perumahan untuk masyarakat miskin;
16. Penataan lahan parkir di Kota Pasuruan;
17. Perbaikan akses jalan;
18. Beasiswa bagi mahasiswa miskin.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dalam hal ini mengampu program prioritas Kepala Daerah Tahun 2025-2029 yaitu program ke 3 Pembangunan rintisan pasar baru di Kecamatan Bugul Kidul.

Berikut ini merupakan prioritas dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan disajikan dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
1	Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Jatim Kerja, Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (Miliar Rupiah)	Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri
				Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Miliar Rupiah)	Meningkatnya Omset Perdagangan	Persentase Peningkatan Nilai Omset Penjualan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota "ANUGRAH" diperlukan sebuah pandangan jauh kedepan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Instansi Pemerintah yang tepat sasaran. Dengan Visi, Misi dan Tujuan dan Strategi yang terdiri dari kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan harus menghasilkan karya yang konsisten dan eksis, antisipatif dan inovatif serta produktif akan mempercepat perwujudan Kota Pasuruan sebagai Kota Perdagangan, Industri dan Jasa.

Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen. Berdasarkan penjabaran tentang visi tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan mendukung visi pembangunan Kota Pasuruan tahun 2025-2029, yakni:

"PASURUAN KOTA ANUGRAH" dalam arti :

"Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya, Harmonis Sosial Budayanya, Indah Kotanya"

Dengan visi tersebut diharapkan bisa menjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dalam rangka ikut serta mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota "ANUGRAH".

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintah tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan adalah sebagai jembatan daripada visi di atas. Dinas Perindustrian dan

perdagangan Kota Pasuruan mengikuti misi ke-3 Kota Pasuruan tahun 2025-2029 yaitu :

“Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan”

Tujuan adalah apa yang akan dicapai untuk dihasilkan dalam rangka kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada persyaratan visi dan misi serta didasarkan kepada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan tersebut adalah:

Meningkatnya PDRB sektor unggulan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dengan rincian strategis. Atas dasar itu, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya produksi sektor perindustrian; dan
2) Meningkatnya omset perdagangan.

Berikut rumusan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang disajikan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi	Metode Perhitungan	Target 2026	Sumber Data
1	Tujuan: Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan atas Dasar Harga Konstan 2010 (dalam Milyar)	Berdasarkan Perhitungan BPS	1400	Pasuruan Dalam Angka (BPS)
		Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan atas Dasar Harga Konstan 2010 (dalam Milyar)	Berdasarkan Perhitungan BPS	2200	
2	Sasaran 1: Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	Nilai Produksi IKM berdasarkan data SIINAS	∑ Nilai Produksi Sektor Industri Unggulan Tahun n - ∑ Nilai Produksi Sektor Industri Unggulan Tahun (n-1) : ∑ Nilai Produksi Sektor Industri Unggulan Tahun (n-1)x100%	0,15%	Bidang Perindustrian (Disperindag)
3	Sasaran 2: Meningkatnya Omset Perdagangan	Persentase Peningkatan Nilai Omset Penjualan	Omset Penjualan Produk dari IKM Sektor unggulan yang dibina	∑ Omset Penjualan Produk Unggulan yang dibina Tahun n - ∑ Omset Penjualan Produk Unggulan yang dibina Tahun (n-1) : ∑ Omset Penjualan Produk Unggulan yang dibina Tahun (n-1)x100%	0,05%	Bidang Perdagangan (Disperindag)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rancangan program/kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026 terdiri atas 7 Program, 14 kegiatan, dan 31 sub kegiatan dari program/kegiatan tersebut membutuhkan anggaran Rp.29.493.756.909,- yang dibagi menjadi 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) Sekretariat, dengan rincian sebagai berikut:

- Sekretariat sebesar Rp 8.878.776.709,-
- Bidang Industri sebesar Rp 932.865.500,-
- Bidang Perdagangan sebesar Rp 1.728.833.200,-
- Bidang Pengelolaan Pasar sebesar Rp 17.953.281.500,-

Realisasi program/kegiatan dari pengajuan anggaran di atas mungkin ada yang belum dapat terlaksana pada tahun anggaran yang direncanakan, yang menjadi pertimbangan terhadap realisasi anggaran berupa rasionalisasi anggaran berdasarkan program prioritas Pemerintah Kota Pasuruan.

Pada tahun 2026, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung dua Prioritas Pembangunan Walikota Tahun 2026 yaitu peningkatan kualitas infrastruktur penunjang perekonomian dan menumbuhkan perekonomian sektor unggulan.

Apabila tidak terlaksana pada tahun yang direncanakan, maka diperlukan penataan kembali rencana program/kegiatan agar dapat terealisasi. Penempatan dan perencanaan tahun berikutnya merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan sesuai dengan kebijakan.

Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan merupakan program prioritas RPJMD 2025–2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program yang tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja baik Program/Kegiatan/Sub kegiatan dipergunakan sebagai data dan informasi untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merancang anggaran, dan memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan. Kemudian, nantinya akan dijadikan bahan pengendalian dan evaluasi dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan ditunjukkan oleh Tabel T-C.33 sebagai berikut:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kota Pasuruan
Nama Perangkat Daerah: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**				**29.493.756.909**				**39.295.522.255**
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN**				**28.560.891.409**				**38.115.522.255**
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Kota Pasuruan**	**3 level 75 Nilai**	**8.878.776.709**	**DAU**			**9.680.116.055**
3	**30**	**01**	**2.01**		**Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai ketentuan**	**Kota Pasuruan**	**11 Dokumen**	**15.008.200**	**DAU**			**19.203.975**
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Pasuruan	6 Dokumen	10.974.200	DAU	1. Renja Tahun n+1 2. P Renja Tahun n 3. RKAP 4. DPPA		12.487.020

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
											5. RKA Tahun n+1 6. DPA Tahun n+1		
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Pasuruan	5 Laporan	4.034.000	DAU	1. LKjIP 2. Monev Tribulan IV Tahun n-1 3. Monev Tribulan I 4. Monev Tribulan II 5. Monev Tribulan III		6.716.955
3	**30**	**01**	**2.02**		**Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**Kota Pasuruan**	**100%**	**7.725.703.059**	**DAU**			**8.073.377.000**
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Pasuruan	67 Orang/bulan	7.669.258.959	DAU	Pembayaran Gaji dan TPP ASN		8.000.000.000

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	16 Laporan	56.444.100	DAU	Penyusunan Laporan Keuangan: 1. Laporan BKU 2. SPJ Fungsional 3. SPJ Administrasi 4. Penutupan Kas 5. Buku Pembantu Pajak 6. Buku Pembantu Bank 7. Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja 8. BA Pemeriksaan Barang 9. Reguler Penutupan Kas 10. Pajak ERP 11. LRA 12. LO 13. LPE 14. Neraca 15. Tepra 16. P1		73.377.000
3	**30**	**01**	**2.03**		**Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Kota Pasuruan**	**4 Laporan**	**8.634.800**	**DAU**			**9.565.080**

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	4 Laporan	8.634.800	DAU	Penyusunan laporan rekonsiliasi BMD tiap tribulanan		9.565.080
3	**30**	**01**	**2.06**		**Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa**	**Kota Pasuruan**	**4 Laporan**	**129.332.400**	**DAU**			**234.550.000**
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Pasuruan	10 Paket	3.434.400	DAU	Paket pengadaan komponen listrik/penerangan: Kabel roll, Lampu LED		4.550.000
3	30	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Pasuruan	1 Paket	10.000.000	DAU	Penyelenggaraan acara PJB		10.000.000
3	30	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	12 Laporan	5.000.000	DAU	Laporan fasilitasi kunjungan tamu tiap bulan		23.500.000
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	12 Laporan	110.898.000	DAU	Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tiap bulan		196.500.000
3	**30**	**01**	**2.07**		**Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang disediakan**	**Kota Pasuruan**	**7 Unit**	**29.699.750**	**DAU**			**150.000.000**
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Pasuruan	4 Unit	29.699.750	DAU	Belanja Modal Komputer		150.000.000

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**30**	**01**	**2.08**		**Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pasuruan**	**4 Laporan**	**772.198.500**	**DAU**			**926.970.000**
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Pasuruan	12 Laporan	1.970.000	DAU	Penyediaan surat menyurat tiap bulan		1.970.000
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Pasuruan	12 Laporan	123.328.000	DAU	Pembayaran tagihan telepon, air dan listrik tiap bulan		135.000.000
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Pasuruan	12 Laporan	646.900.500	DAU	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor tiap bulan		790.000.000
3	**30**	**01**	**2.09**		**Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**Kota Pasuruan**	**37 Unit**	**198.200.000**	**DAU**			**266.450.000**
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Pasuruan	11 Unit	145.450.000	DAU	Memelihara dan membayar pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		145.450.000
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan	Kota Pasuruan	13 Unit	7.000.000	DAU	Memelihara dan membayar pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		8.000.000

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						dibayarkan pajak dan perizinannya							
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Pasuruan	12 Unit	17.750.000	DAU	Memelihara Peralatan dan Mesin Lainnya		38.000.000
3	30	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Pasuruan	1 Unit	28.000.000	DAU	Pemeliharaan Gedung Kantor		75.000.000
3	**30**				**Urusan Perdagangan**				**19.682.114.700**				**28.435.406.200**
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**70%**	**53.217.000**	**DAU**			**126.000.000**
3	**30**	**02**	**2.06**		**Kegiatan : Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah pedagang/produsen yang memenuhi asas perlindungan konsumen**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**14 Pedagang/ Produsen**	**53.217.000**	**DAU**			**126.000.000**

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	02	2.06	03	Sub Kegiatan : Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen (P-B2)	Jumlah laporan hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kota Pasuruan	2 Laporan	53.217.000	DAU	Pengawasan Barang Beredar , Pembelian Toolkit barang berbahaya , sms blast 202rb penerima sms		126.000.000
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang layak**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**10%**	**17.953.281.500**	**DAU**			**25.114.406.200**
3	**30**	**03**	**2.01**		**Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase pasar yang direvitalisasi**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**50%**	**13.897.745.200**	**DAU**			**24.936.406.200**

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	03	2.01	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	Kota Pasuruan	3 Unit	12.597.745.200	DAU	Pembangunan embrio pasar baru Bugul Kidul, Pemeliharaan Kios Pasar Kebonagung, Pemeliharaan Pasar Loak Gadingrejo, Pengadaan Bak Kontainer Truk Sampah Pasar 2 unit, Pengadaan Karcis Retribusi Pelayanan Pasar, Pengadaan PC 6 unit dan Printer Pasar 6 unit, Belanja Bahan Bangunan dan Kontruksi, Jasa Penanganan Sarana dan Prasarana Umum		22.936.406.200
3	30	03	2.01	02	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Kota Pasuruan	6 Unit	1.300.000.000	DAU	Operasional Rutin UPT Pasar se-Kota Pasuruan		2.000.000.000

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**30**	**03**	**2.02**		**Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**100%**	**4.055.536.300**	**DAU**			**178.000.000**
3	30	03	2.02	01	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	Kota Pasuruan	4 Dokumen	4.055.536.300	DAU	Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pemeliharaan Tenda Kerucut, monev Capaian PAD, Lembur Non ASN, Updating Data PKL diluar Lokus Perwali +Honorarium Tenaga Harian Lepas dan Outsorcing Tenaga Keamanan dan Kebersihan Pasar		178.000.000
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Indeks Perkembangan Harga**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**2 Indeks**	**595.912.300**	**DAU**			**880.000.000**
3	**30**	**04**	**2.02**		**Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Jumlah Bahan Pokok dan Barang Penting yang dipantau**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**69 Bapokting**	**595.912.300**	**DAU**			**880.000.000**

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	04	2.02	02	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Pasuruan	12 Laporan	94.697.900	DAU	Monitoring Harga dan Ketersediaan Bapokting 365 hari, Operasi Pasar Kepada Pedagang 6 paket		180.000.000
3	30	04	2.02	03	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	2 Laporan	501.214.400	DAU	Pelaksanaan Pasar Murah 2x		700.000.000
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Presentase Kepatuhan Pedagang/pelaku usaha terhadap tertib niaga**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**65%**	**110.164.400**	**DAU**			**615.000.000**
3	**30**	**06**	**2.01**		**Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**	**Presentase Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang telah di Tera dan Tera Ulang**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**16%**	**110.164.400**	**DAU**			**615.000.000**

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	06	2.01	01	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kota Pasuruan	2100 Unit	97.787.800	DAU	Sidang TTU ke Pasar dan Kelurahan, loko ke Perusahaan, Asosiasi Pedagang Emas, Pelayanan dalam kantor, dan pelaku usaha lainnya yang memiliki UTTP untuk transaksi perdagangan di Kota Pasuruan		600.000.000
3	30	06	2.01	02	Sub Kegiatan : Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kota Pasuruan	40 orang	12.376.600	DAU	Penyuluhan ke Pelaku Usaha pemilik alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)		15.000.000
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Presentase IKM yang Mengalami Peningkatan Pemasaran**	**Kota Pasuruan**	**30%**	**969.539.500**				**1.700.000.000**
3	**30**	**07**	**2.01**		**Kegiatan: Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Persentase IKM yang dipromosikan**	**Kota Pasuruan**	**20%**	**969.539.500**				**1.700.000.000**

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	07	2.01	01	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	20 UMKM	969.539.500		INACRAFT, APEKSI NASIONAL		1.700.000.000
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN**				**932.865.500**	**DAU**			**1.180.000.000**
3	31	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase peningkatan IKM berkembang**	**Dalam dan Luar Kota**	**5%**	**932.865.500**	**DAU**			**1.180.000.000**
3	31	**02**	**2.01**		**Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase IKM berkembang**	**Dalam dan Luar Kota**	**20%**	**932.865.500**	**DAU**			**1.180.000.000**
3	31	02	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dalam dan Luar Kota	5 Dokumen	192.865.500	DAU	Dekranasda		300.000.000
3	31	02	2.01	03	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Pasuruan	2 Dokumen	150.000.000	DAU	-Sertifikasi TKDN -Sertifikasi Halal		175.000.000

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	31	02	2.01	04	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kota Pasuruan	2 Dokumen	175.000.000	DBHCHT			175.000.000
3	31	02	2.01	05	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Pasuruan	2 Dokumen	350.000.000	DAU	Belanja Pakaian Kerja Lapangan, Pemeliharaan Gedung UPT Logam, Belanja Modal Penyedot Debu, Belanja Modal Mesin Proses, Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya.		450.000.000
3	31	02	2.01	06	Sub Kegiatan: Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Pasuruan	2 Dokumen	65.000.000	DAU	Implementasi dan Monitoring Pelaporan di SIINAS, pemeriksaan kualitas garam industri		80.000.000

BAB V

PENUTUP

Indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan akan sangat bergantung pada komitmen dan peran serta aktif melalui profesionalisme aparatur pemerintahan, umpan balik pembangunan dari masyarakat, dan yang terakhir adalah pemerataan hasil-hasil pembangunan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2026 merupakan rencana tahunan yang di dalamnya memuat kebijakan pembangunan yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun 2026.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan ditetapkan untuk memberi arah dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di Kota Pasuruan maupun masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan berkewajiban mempedomani RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan 2025-2029 dalam menyusun langkah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya koordinasi yang matang dan sinergi antar bidang dan sub bidang, baik dalam lingkup internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan sendiri, maupun dengan lembaga perangkat daerah lain dalam upaya menekan sekecil mungkin hambatan dan kendala yang terjadi yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan kinerja.

Melalui tersusunnya Renja 2026 ini diharapkan seluruh program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kota Pasuruan dapat terlaksana dengan baik dan terarah sesuai rencana kerja.

Pasuruan, 28 Agustus 2025

Plt. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PASURUAN

HERY DWI SUJATMIKO, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19701223 199003 1 001